PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. MAMUJU TENGAH

2025 - 2029



dinaspupr.mateng@gmail.com

www.dinaspupr.mamujutengahkab.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sekaligus menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju Tengah yang terus berkembang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Mamuju Tengah itu sendiri.

Secara umum, Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar di sektor infrastruktur, seperti : keterbatasan jaringan jalan yang mantap, belum optimalnya sistem drainase dan irigasi, rendahnya persentase bangunan gedung publik yang memenuhi standar teknis dan fungsi, serta perlunya penguatan dalam penataan ruang dan kawasan, khususnya dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi ini menjadi latar belakang utama disusunnya Renstra Dinas PUPR, sebagai respon strategis terhadap kebutuhan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan ruang.

Penyusunan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib pelayanan dasar; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029, sebagai penjabaran teknis terbaru dalam merumuskan arah kebijakan Perangkat Daerah yang sinergis dan integratif.

Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah memiliki nilai strategis sebagai berikut :

a. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

   Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur selama lima tahun ke depan, khususnya yang mendukung keterpaduan kawasan agropolitan.

b. Instrumen Akuntabilitas Kinerja

   Memuat indikator kinerja utama yang terukur sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan bidang PUPR.

c. Mewujudkan Tata Ruang Berkelanjutan

   Mendorong penataan ruang yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan lingkungan, termasuk percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Kabupaten.

d. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar

   Berorientasi pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan dasar seperti jalan, drainase, irigasi, sanitasi, dan air minum bagi masyarakat.

e. Penguatan Daya Saing Daerah

Mendukung konektivitas dan efisiensi wilayah, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan pusat-pusat produksi pertanian.

Dengan latar belakang tersebut, Renstra Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 disusun secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 ini, berdasar kepada :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045;
i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
j. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
k. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
l. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahuun 2002 tentang Bangunan Gedung;
r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
w. Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
x. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR selama periode lima tahun. Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025–2029, yakni :

1. Menjabarkan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029;
2. Menjadi acuan operasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah;
3. Menjamin konsistensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan pendekatan hasil;
4. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya dalam pengembangan kawasan agropolitan;
5. Menyediakan dasar penilaian Kinerja Perangkat Daerah secara sistematis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan dapat dievaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, paling sedikit memuat :

1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan;

1.3 Maksud dan Tujuan; serta

1.4 Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas, fungsi, dan struktur) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah periode sebelumnya, mengemukakan kelompok sasaran dan mitra pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, mengemukakan kerja sama dengan instansi/stakeholder, mengemukakan identifikasi permasalahan, mengidentifikasikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.

1. Subbab. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
    a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
    b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
    c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
    d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.
2. Subbab. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat :
    a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
    b. Isu Strategis;
    c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Berisi tentang tujuan, sasaran dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berdasar pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, dan juga mengemukakan arah kebijakan Renstra yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, serta selaras dengan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra ini.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, melalui Indikator Kinerja Utama dan target kinerja penyelenggaran urusan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Menteri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana dan sarana / infrastruktur ke PU-an, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai upaya yang tertuang dalam visi dan misi agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang ke PU-an di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah (pada Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 122), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, sebagaimana tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah terdiri atas :

1. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   - Tugas : melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata perundangan, pengelolaaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
   - Fungsi :
     - penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
     - penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;

- penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan administrasi keuangan;
- penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat kerja terkait;
- penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat daerah terkait; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

  Tugas : mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan, penyedian data dan informasi publik Satuan Kerja; dan
- Subbagian Tata Usaha

  Tugas : mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

2. Bidang Sumber Daya Air;
   - Tugas : melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rayat konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.
   - Fungsi :
     - Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
     - Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
     - Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
     - Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
     - Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
     - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Bina Marga;
   - Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
   - Fungsi :
     - Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
     - Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
     - Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
     - Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
     - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Susunan organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Cipta Karya;
   - Tugas : melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem

drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

- Fungsi :
    - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
    - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
    - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
    - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
    - Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
    - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
    - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Bina Konstruksi;
    - Tugas : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
    - Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
    - Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
    - Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
    - Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
    - Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
    - Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
    - Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
    - Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
    - Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

6. Bidang Tata Ruang.
    - Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
    - Fungsi :
        - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
        - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
        - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
        - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
        - Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
        - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Susunan organisasi Bidang Tata Ruang juga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur berdasarkan tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari masing-masing Bidang :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(*Sumber data : PerBup. Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024*)

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, bahkan unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.

- Sumber Daya Manusia

  Susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dapat dikelompokkan menurut jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN, secara jabatan struktural/fungsional dan eselon, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah sebanyak 169 orang, terdiri dari 32 (tiga

puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil, 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 124 (seratus dua puluh empat) orang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

Tabel 2.1 Data Pegawai ASN Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berdasarkan Jenis ASN dan Non ASN)

No.	Aparatur Sipil Negara	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	10
3	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K)	3
4	Non ASN	124
TOTAL		**169**

(*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per Juli 2025*)

Tabel 2.2 Data Pegawai ASN Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berdasarkan Struktural/Eselon/Fungsional)

No.	Nama Jabatan	Struktural/Eselon				Jumlah
		II	III	IV	-	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		4			4
4	Kasubbag./Kasubid.			1		1
5	Kepala UPTD			1		1
6	Jabatan Fungsional				4	4
7	Staff				33	33
TOTAL		**1**	**5**	**2**	**37**	**45**

(*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per Juli 2025*)

Tabel 2.3 Data Pegawai ASN Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berdasarkan Golongan ruang)

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk. I, IV/b	2
2	Pembina, IV/a	1
3	Penata Tk. I, III/d	3
4	Penata, III/c	6
5	Penata Muda Tk. I, III/b	18
6	Penata Muda, III/a	9
7	Pengatur Tingkat I, II/d	1
8	Pengatur, II/c	2
9	P3K	3
TOTAL		**45**

(*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per Juli 2025*)

Tabel 2.4 Data Pegawai ASN Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No.	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	S-2 (Magister)	4
2	S-1 (Sarjana) / D-IV	28
3	D-III	3
4	SLTA/SMA	2
TOTAL		**37**

(*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per Juli 2025*)

- Sumber Daya Aset

Sumber daya aset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi, meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah terletak di Jl. Tammauni Pue Ballung, Kompleks Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, Kec. Tobadak, di mana mulai ditempati sebagai kantor operasional pada tahun 2018-2019, sejak sebelumnya berada di Jl. Poros Trans Sulawesi (samping Café Kilometer Satu). Di samping itu, sebagai bagian dari bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat, terdapat kantor UPTD Air bersih yang mendukung tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari sektor pelayanan kebutuhan dasar (air bersih). Dalam melaksanakan fungsi yang maksimal dari UPTD Air bersih ini, juga ditempatkan 5 Instalasi Kantor Kecamatan (IKK), yang berada di masing-masing kecamatan (Pangale,Budong-budong,Tobadak,Topoyo, Karossa) untuk dapat menjangkau secara cepat kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan yang saat ini berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, yakni : 1 unit Mobil Operasional untuk Kepala Dinas (*merk Triton*), 2 unit Mobil Lapangan (*merk Hilux dan Rush*), serta terdapat juga beberapa unit kendaraan roda 2 di masing-masing IKK (1 unit motor oleh Kepala IKK), juga 8 unit yang digunakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kegiatan operasional dalam rangka melakukan monitoring di lokasi pekerjaan.

c. Peralatan dan Mesin Lainnya

Peralatan dan mesin lainnya yang dimaksudkan adalah berupa Komputer/PC, Laptop, dan Printer, yang dipergunakan untuk melakukan proses pelayanan, mengolah data, serta surat-menyurat yang dioperasikan secara *digital*. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya kurang baik, sehingga masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan zaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pengolahan data maupun layanan dapat terakomodir. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer dan printer baru, maka dapat menunjang fungsi dari peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan mesin lainnya seperti meja, kursi, almari dan lain sebagainya kondisi masih layak pakai dan layak fungsi.

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah

Bidang Bina Marga

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Meja Staf	NN	Buah	2022	2	Baik
2	Meja Eselon	Melody Furniture	Buah	2022	1	Baik
3	Kursi Eselon	Frontline	Buah	2022	1	Baik
4	Kursi	Crown	Buah	2022	7	Baik
5	Kursi	Avery	Buah	2022	2	Baik

Bidang Cipta Karya

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Meja Eselon	Vanessa	Buah	2022	1	Baik
2	Meja Staf	NN	Buah	2022	2	Baik
3	Kursi Eselon	Frontline	Buah	2022	1	Baik
4	Kursi	Crown	Buah	2022	7	Baik
5	Kursi	Avery	Buah	2022	1	Baik
6	Ac	Sharp	Unit	2022	1	Baik
7	Printer	Epson L3210	Unit	2022	1	Baik
8	Printer	Epson L3150	Unit	2022	1	Baik
9	Laptop	Msi-MS-16R5	Unit	2022	1	Baik
10	Drone	DJI MAVIC AIR 2	unit	2022	1	Baik

Bidang Tata Ruang

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Meja Eselon	Vanessa	Buah	2022	1	Baik
2	Meja Staf	NN	Buah	2022	2	Baik
3	Kursi Eselon	Front Line	Buah	2022	1	Baik
4	Kursi	Crown	Buah	2022	3	Baik

Bidang PSDA

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Meja Staf	NN	Buah	2022	2	Baik
2	Kursi	Crown	Buah	2022	1	Baik
3	Meja Eselon	Melody Furniture	Buah	2022	1	Baik
4	Kursi Eselon	Frontline	Buah	2022	1	Baik

5	Motor	Honda Genio	Unit	2022	1	Baik
6	Ac	Polytron	Unit	2022	1	Baik
7	Kulkas	Sharp	Unit	2022	1	Baik

Sekretariat

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Printer	Epson L3210	Buah	2022	4	Baik
2	Printer	Brother Mfc-J3530dw	Buah	2022	1	Baik
3	Mobil	Mitsubishi Strada Triton	Unit	2022	1	Baik
4	Laptop	Msi-Ms-16r5	Unit	2022	1	Baik
5	Layar Proyektor	Inforce	Unit	2022	1	Baik
6	Kulkas	Polytron	Unit	2022	1	Baik
7	Kursi Sofa Tamu+Meja	Procella	Set	2022	1	Baik
8	Kursi Kadis	Kantor D056 Reclening	Buah	2022	1	Baik
9	Kursi Sekretaris	Frontline	Buah	2022	1	Baik
10	Kursi Staf	Crown	Buah	2022	3	Baik
11	Kursi Tamu Kadis	Avery	Buah	2022	1	Baik
12	Kursi Rapat	Kursi Roda Jaring Merah	Buah	2022	12	Baik
13	Meja Staf	Nn	Buah	2022	2	Baik
14	Meja Rapat	Uno	Unit	2022	2	Baik
15	Ac	Sharp	Unit	2022	1	Baik
16	Ac	Polytron	Unit	2022	1	Baik
17	Brankas	Lion	Buah	2022	1	Baik
18	Kursi	Avery	Buah	2022	1	Baik

UPTD IPLT

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang
1	Meja Staf	Toppan	Buah	2024	2	Baik
2	Kursi Eselon		Buah	2024	1	Baik
3	Kursi	Futura	Buah	2024	6	Baik

UPTD Air Bersih

No.	Jenis / Nama Barang	Merk / Model	Satuan	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang / Registrasi	Kondisi Barang	Ket.
1	Meja Kerja Staff	Olimpyc	Unit	2019	7	2 Baik, 2 Rusak Ringan, 3 Rusak Berat	IKK Karondang,Kantor UPTD Air Bersih
2	Kursi Kerja	Kursi Tunggu	Unit	2019	1	Baik	UPTD Air Bersih
3	Kursi Kerja	Frontline	Unit	2019	4	Rusak	UPTD Air Bersih, Gudang Tabolang
4	Laptop	Lenovo/Ideapad 330	Unit	2019	2	1 Baik, 1Rusak	
5	Printer	Epson L3110	Unit	2019	4	1 Baik, 3 Rusak	Gudang Tabolang, IT
6	Printer	Epson L310	Unit	2019	1	Rusak	Gudang Tabolang
7	Kipas Angin	Cosmost	Unit	2019	4	3 Baik, 1 Rusak	IKK Tabolang, IKK Karossa
8	Handphone	Asus Zenvon Live	Unit	2019	3	2 Baik, 1 Rusak	
9	Handphone	Xiaomy Redmy 6a	Unit	2019	3	1 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat	
10	AC	Polytron	Unit	2019	1	Rusak	IT
11	Printer	Lx310	Unit	2019	1		IKK Karondang
12	UPS	Prolink1201SFCU	Unit	2024	1		Kantor UPTD Air Bersih

(*Sumber Data : Bendahara Aset Dinas PUPR Kab. Mamuju Tengah per Juli 2025*)

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, meliputi urusan terkait pekerjaan umum dan penataan ruang.

Strategi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah diarahkan untuk pembangunan di segala bidang melalui salah satu misi kabupaten Mamuju Tengah melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infrastruktur, seperti : Air bersih, sanitasi, irigasi, jalan/jembatan, dan sebagainya.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dapat diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024, yaitu :

Tabel 2.6 Capaian Kinerja dari Indeks SPM Dinas PUPR Kab. Mamuju Tengah

No.	Indikator	Target				Realisasi				Rasio Capaian Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Mamuju Tengah	70,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	87,00 %	91,00 %	84,00 %	**107,14 %**	**87,00 %**	**91,00 %**	**84,00 %**
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,00 %	86,00 %	86,39 %	77,22 %	**118,57 %**	**86,00 %**	**86,39 %**	**77,22 %**
3	Tingkat Kemantapan Jalan	56%	63%	73%	38%	56,28 %	52,95 %	37,71 %	24,55 %	**100,50 %**	**84,05 %**	**51,66 %**	**64,61 %**

(*Sumber Data : Bag. Perencanaan Dinas PUPR Kab. Mamuju Tengah*)

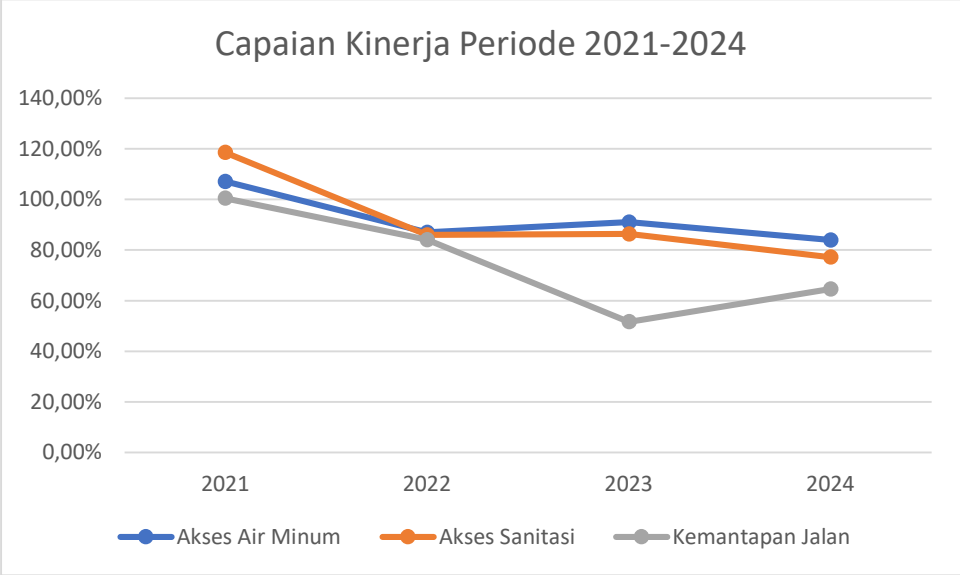

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Periode 2021-2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada tabel dan grafik di atas, bahwa selama periode 2021-2024, terjadi penurunan kinerja di sektor akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Mamuju Tengah, serta akses sanitasi, walaupun sempat naik tidak secara drastis pada tahun 2022 ke tahun 2023. Sedangkan di sektor kemantapan jalan, terjadi penurunan yang sangat drastis, walaupun dari tahun 2023 hingga 2024 mulai terjadi kembali kenaikan capaian kinerja. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan adanya pembaharuan SK Jalan Kabupaten, di mana terdapat ruas-ruas jalan yang bukan tergolong atau termasuk ke dalam penanganan kabupaten (update penilaian kondisi dari Kementrian PUPR), mengakibatkan penurunan kinerja karena ruas-ruas jalan yang disesuaikan.

d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta

mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah menetapkan kelompok sasaran yang menjadi fokus dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis ini.

Kelompok sasaran yang dimaksud, yakni :

1. Masyarakat Kab. Mamuju Tengah;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
4. Instansi Vertikal;
5. DPRD Kab. Mamuju Tengah; dan
6. Pelaku Badan Usaha seputar Konstruksi.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pokok dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, sebagai berikut :

1. Banyaknya jalan yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan;
2. Masih kurang luasnya wilayah irigsi (jaringan irigasi))untuk mewujudkan swasembada pangan;
3. Tempat pengelolaan sampah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
4. Belum terpenuhinya semua rumah tangga pengguna air bersih;
5. Belum terpenuhinya semua rumah tangga yang berakses sanitasi;
6. Masih rendahnya penanganan sampah;
7. Masih kurangnya rumah penduduk yang berakses air minum;

8. Belum maksimalnya tenaga kerja konstruksi (diutamakan lokal) dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan, sehingga berakibat pada kualitas mutu konstruksi yang kurang atau tidak sesuai standar;
9. Masih kurangnya rumah penduduk yang memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau asal membangun;
10. Masih banyaknya masyarakat yang membangun di daerah/kawasan perkebunan, bahkan hutan lindung;
11. Penambangan secara liar, tanpa izin yang seharusnya kerap kali beroperasi;
12. Masih kurangnya pengelolaan administrasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Isu Strategis

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa ekstenal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga tantangan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional);
   a. Isu Global

      Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional/global yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah di masa mendatang, utamanya yang

berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni :

- Ketahanan Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Berkaitan dengan ketersediaan air, pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan air, sementara perubahan iklim mengancam ketersediaan sumber daya air. Sedangkan dengan pengelolaan air, saat ini, dunia sangat perlu memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Dengan diadakannya pertemuan Water World pada tahun 2024, permasalahan pengelolaan dan ketahanan air ini juga menjadi fokus global dalam mengantisipasinya.
- Pembangunan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur yang mendukung SDGs, seperti pembangunan jalan yang terintegrasi, perumahan yang terjangkau, dan pengelolaan sampah yang baik.
- Konektivitas Wilayah. Membangun infrastruktur yang terintegrasi antar moda transportasi (darat, laut, udara) untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan infrastruktur untuk mengurangi dampak lingkungan, serta pengelolaan lahan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem.

b. Isu Nasional

- Aspek pembangunan infrastruktur dan perumahan. pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penanganan kawasan kumuh, penyediaan perumahan, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang;

- SDGs. Pembangunan infrastruktur juga harus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan terkait perkotaan berkelanjutan, ketersediaan air bersih, dan infrastruktur yang inklusif;
- Pengembangan Kawasan Prioritas. pengembangan kawasan prioritas, termasuk kawasan destinasi wisata dan kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
- Penyusunan RTRW daerah;
- Peningkatan kualitas jasa konstruksi.

Isu nasional ini kemudian tertuang ke dalam sasaran utama Kementrian PU, yakni program 608 : efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun).

c. Isu Regional

- Peningkatan Konektivitas Wilayah. Dinas PUPR Sulbar berfokus pada pembangunan dan perbaikan jalan provinsi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama di wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dengan membuka akses ke berbagai fasilitas dan peluang ekonomi;
- Mitigasi Bencana Gempa Bumi. Penyusunan strategi mitigasi bencana gempa bumi menjadi fokus utama, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan pemasangan seismometer, dengan dukungan dari pihak Jepang, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

- Pengembangan Kawasan Pariwisata. Dinas PUPR mendukung pengembangan kawasan pariwisata nasional, seperti KPPN Majene, melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar. Isu strategis lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- Pengelolaan Sumber Daya Air. Dinas PUPR juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi, untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan.
- Penyusunan RTRW. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan memastikan pembangunan yang terarah serta berkelanjutan.
- Pembangunan Sport Center. Pembangunan sport center di kawasan Polda Sulbar merupakan salah satu upaya pengembangan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan fasilitas lain; dan
- Transformasi Digital. Dinas PUPR Sulbar juga melakukan transformasi digital dalam pengelolaan infrastruktur, termasuk evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

c. Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip perwujudan pembangunan berkelanjutan.

Adapun perumusan/kesimpulan dari isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk perlindungan hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar, yakni : rumah tangga pengguna air bersih, bersanitasi layak dan aman, serta banjir di banyak tempat	Pencemaran air sungai				Kondisi jalan, jembatan, dan sistem drainase yang belum memadai, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang belum merata.
	Tempat pengelolaan sampah yang masih kurang	Pengelolaan sampah				
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur	Banyaknya jalan yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan					Infrastruktur yang dibangun mudah rusak

seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial						akibat kualitas material yang rendah atau konstruksi yang tidak sesuai standar
	Masih kurang luasnya wilayah irigsi (jaringan irigasi))untuk mewujudkan swasembada pangan					Kurangnya ketersediaan air untuk pengairan di sawah, melalui irigasi yang belum memadai
	Pembangunan di kawasan hutan atau perkebunan; Penambangan secara liar	Alih fungsi lahan				Tata ruang yang belum tertata dengan baik, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah/lahan.
		Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar/tanpa izin (seperti : batu, pasir, timbunan)				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah diketahui permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang berkembang, maka dalam mengatasi hal-hal tersebut, diperlukan tujuan, sasaran, hingga strategi dan arah kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini.

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional, yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah, terlebih dahulu diketahui apa dan bagaimana penjelasan dari Visi Misi Kepala Daerah (dalam RPJMD 2025-2029) yang telah terpilih, untuk kemudian diramu berdasarkan sehingga menghasilakn program-program yang dapat mendorong

tercapainya visi misi tersebut. Berikut adalah gambar dari alur konsep penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, beserta keterkaitan antara RPJMD dan Renstra PD tersebut.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

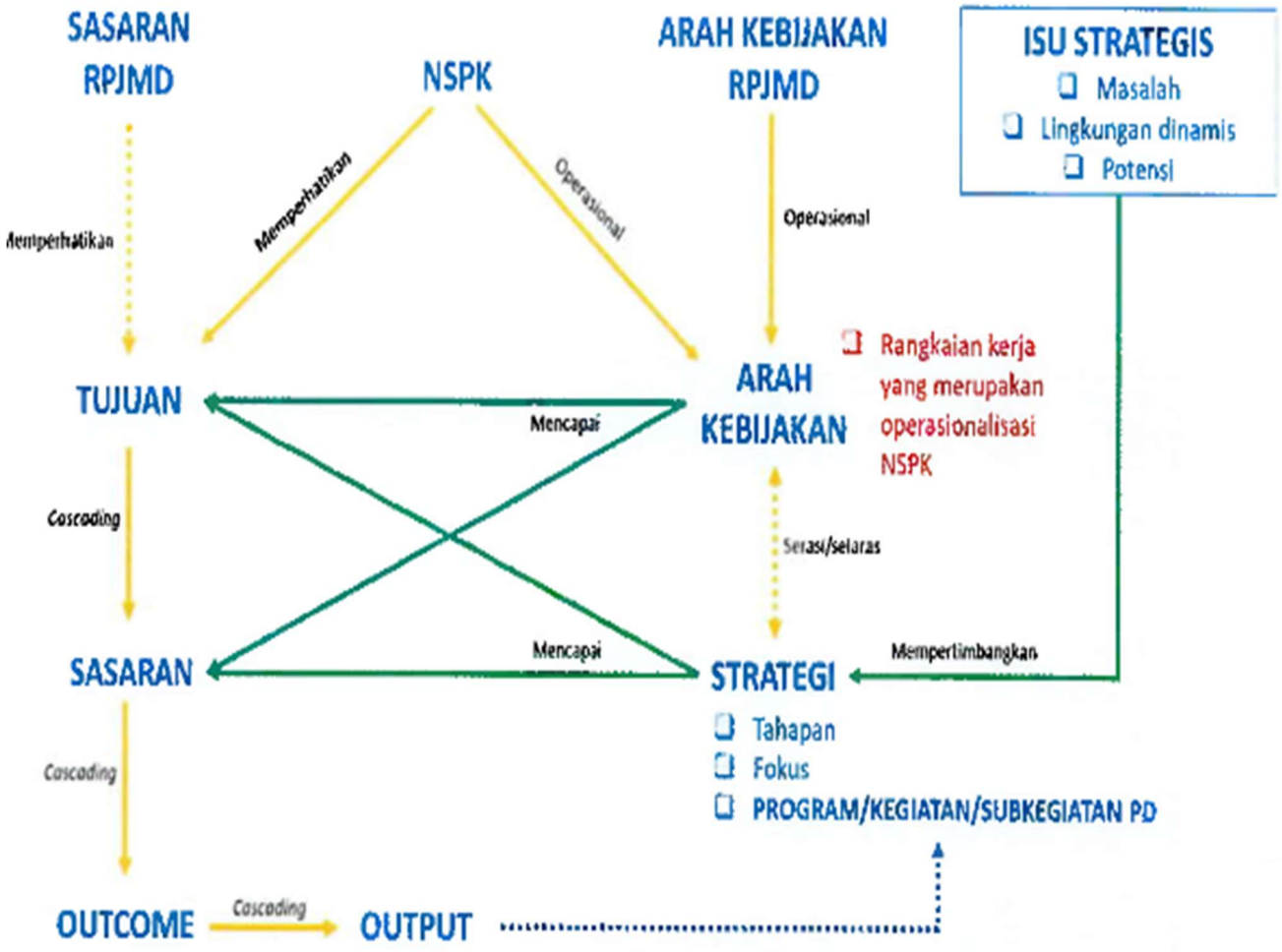

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

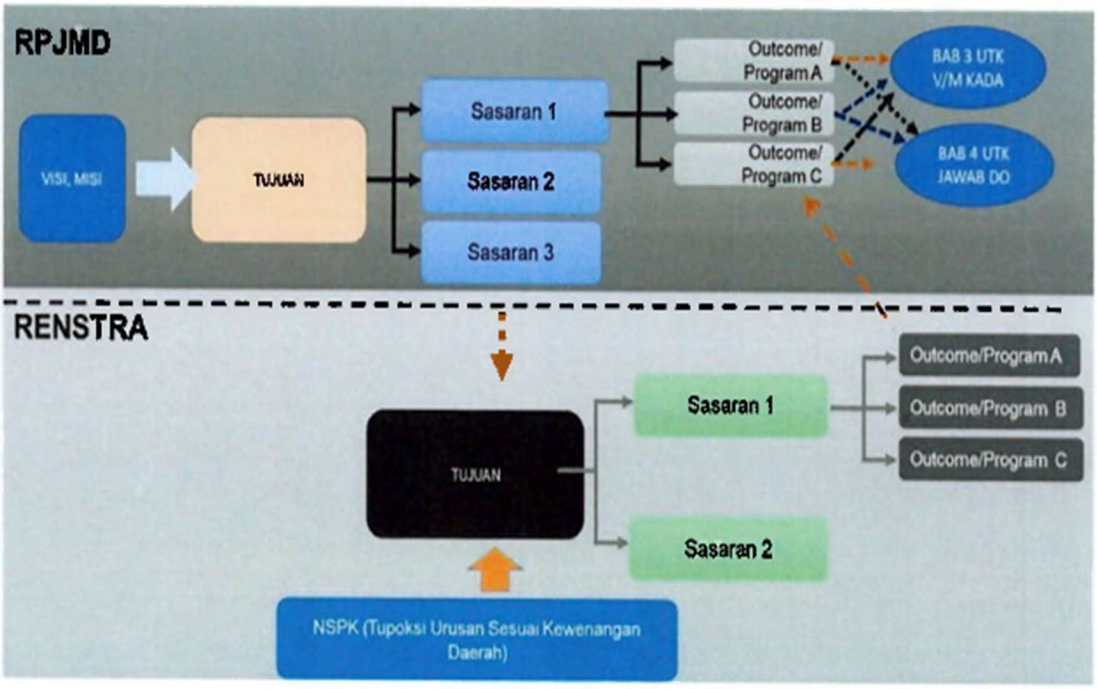

Setelah memperhatikan alur dari konsep penyusunan renstra tersebut di atas, terlebih dahulu kita mengetahui Visi Misi dari Kepala Daerah, untuk dapat menentukan mengetahui Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD, yang kemudian dapat diturunkan kepada Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, hingga menghasilkan program-program yang dapat mendukung tercapainya visi misi tersebut.

Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi masa depan Mamuju Tengah yang hendak diwujudkan pada akhir periode 2025-2029. Berdasarkan analisis isu strategis daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, dan keselarasan dengan rancangan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, maka rumusan visi kami adalah sebagai berikut :

"MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"

Pada rumusan visi ini terkandung makna bahwa pada tahun 2029 wilayah Mamuju Tengah dicirikan sebagai daerah agropolitan, dalam arti sebuah daerah pertanian/ perkebunan, yang di dalamnya berkembang Kota Terpadu Mandiri. Kota Terpadu Mandiri tersebut menempatkan Tobadak sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki kecukupan infrastruktur untuk ativitas ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. Kota Terpadu Mandiri di Tobadak terintegrasi dengan pertumbuhan wilayah Topoyo dan Budong-Budong dan saling mendukung dengan pertumbuhan wilayah Pangale dan Karossa dalam basis ekonomi pertanian dan perikanan.

Maju adalah kondisi masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2029 yang sehat dan cerdas sehingga mampu berperan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung perkembangan daerah agropolitan. Maju juga merupakan gambaran tentang terpenuhinya infrastruktur daerah yang mendukung koneksivitas wilayah, pelayanan dasar, aktivitas perekonomian.

Sejahtera adalah kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi. Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman dan ketertiban umum dalam suasana interaksi antar ummat beragama yang rukun, kebudayaan yang maju, partisipasi pemuda yang kreatif, dan relasi gender yang setara.

Berkelanjutan adalah kondisi alam dan lingkungan Mamuju Tengah yang lestari dan didalam perkembangannya terjalin keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berkelanjutan juga bermakna terwujudnya tata kelola yang berintegritas serta menjamin kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

Tujuan dari Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas.

Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai serangkaian upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi ini bersumber dari misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah serta diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupate Mamuju Tengah 2025-2045. Sebagaimana ditekankan dalam RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, periode 2025-2029 adalah tahap perkuatan transformasi. Berdasarkan hal itu maka misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029 adalah sebagai berikut :

(1) Memperkuat transformasi sosial

Misi ini diarahkan pada terwujudnya manusia dan masyarakat Mamuju Tengah yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

(2) Memperkuat transformasi ekonomi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi melalui penerapan iptekin dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya perekonomian yang dimiliki oleh Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital dalam mendukung aktivitas perekonomian; integrasi ekonomi daerah dengan ekonomi wilayah yang lebih luas terutama bila IKN di Kalimatan telah berkembang; dan pengembangan perkotaan berbasis agropolitan dan perdesaan berbasis agribisnis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(3) Memperkuat transformasi tata kelola

Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola berintegritas sesuai aspirasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, pelayanan publik yang sesuai standar, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan akuntabilitas kinerja yang baik.

(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kondisi daerah yang aman untuk semua dan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat secara terjangkau. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, mewujudkan kondisi sosial politik dan demokrasi substansial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro daerah terutama pengendalian inflasi dan ketersediaan barang penting dan pokok bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

(5) Memelihara ketahanan sosia budaya dan ekologi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya harmoni sosial-budaya dalam bingkai kearifan lokal Lalla Tassisara serta ketahanan ekologi dalam menghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju dan saling mengapresiasi, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, ketahanan pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata

Misi ini bertujuan pada terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan yang seimbang antar kecamatan, antara wilayah perkebunan dengan wilayah pesisir, antara pedalaman dengan pusat perkotaan, dan antara sentra agropolitan dengan sentra agribisnis/agrikultur.

(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas

Misi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur serta sarana prasarana yang berkualitas. Misi ini mencakup upaya umum dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah terutama jalan/jembatan dan sarana-prasarana pelayanan dasar terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pusat pertumbuhan terutama pengembangan agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan agrikultur.

(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kesinambungan antar tahun dan antar tahapan pembangunan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal, dan daya saing investasi daerah.

Dari delapan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberikan mandat/berkewajiban untuk mendorong tercapainya misi yang ke-7 (tujuh), yaitu : "Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas".

Dalam mendorong tercapainya Visi Misi dari Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, Misi ke-7 ini menjadi fokus utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bersama misi-misi yang lainnya yang dapat dilakukan *crosscutting* dalam pelaksanaannya, kemudian merumuskan Tujuan, Sasaran, beserta Indikatornya, sebagai berikut :

Tujuan : "**Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas**"

- Indikator : **Indeks Infrastruktur**

Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut :

Sasaran I (S.1) : "**Meningkatnya cakupan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan**"

- Indikator :
  1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota;

2. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman);
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;
4. Tingkat Kemantapan Jalan;

Sasaran II (S.2) : "**Terlaksananya penataan ruang dan pengendalian kawasan strategis agropolitan secara adaptif dan berkelanjutan**"

- Indikator :
  1. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota; dan
  2. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

Sasaran III (S.3) : "**Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal dalam mendukung pembangunan wilayah agropolitan**"

- Indikator :
  1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik;
  2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi.

Sasaran IV (S.4) : "**Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR**"

- Indikator :
  1. Nilai SAKIP;
  2. Persentase Material Pemeriksaan Keuangan.

Adapun Tabel lengkap dari Tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Mamuju Tengah Periode 2025 – 2029, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Infrastruktur	58.65	58.99	59.41	61.14	62.86	64.91	
		Meningkatnya cakupan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan	Rumah Tangga dengan akses air minum aman	100	100	100	100	100	100	%
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	100	100	100	100	100	100	%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	15	15	15	15	15	15	%
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	25.20	26.20	27.20	28.20	29.20	30.20	%
		Terlaksananya penataan ruang dan pengendalian kawasan strategis agropolitan secara adaptif dan berkelanjutan	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	100	100	100	100	100	100	%
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0	40	42.5	45	47.5	50	%
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	20	40	60	80	100	%

		kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal dalam mendukung pembangunan wilayah agropolitan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0	100	100	100	100	100	%
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR	Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	B	BB	BB	Nilai
			Persentase Material Pemeriksaan Keuangan (%)	100	100	100	100	100	100	%

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

1. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan / sub kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Renstra PD.

   Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni :

   a. Mengadakan perencanaan peningkatan kapasitas layanan air bersih;
   b. Melakukan perencanaan pembangunan IKK ataupun IPAL untuk distribusi air bersih yang memadai;
   c. Melakukan pemerataan penerima bantuan sanitasi yang layak dan aman;
   d. Melaksanakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan agar dapat dilakukan penanganan yang tepat sasaran;
   e. Melakukan inventarisasi dan peningkatan kondisi jaringan irigasi, untuk mendukung program swasembada pangan;
   f. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
   g. Menetapkan Revisi RTRW Kab. Mamuju Tengah;
   h. Melakukan identifikasi kebutuhan tenaga kerja konstruksi, demi menghasilkan kualitas pembangunan yang memadai;
   i. Mengidentifikasi daerah rawan banjir dan abrasi;
   j. Peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan

Renstra PD yang mengacu pada Penahapan RPJMD, dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perencanaan, Pemetaan & Konsolidasi Awal Fokus pada Penyusunan dokumen teknis, pemetaan prioritas, dan penetapan skala urgensi , , seperti : Penyelesaian Revisi RTRW, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir & abrasi	Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir & abrasi	Ekspansi dan Konektivitas Lintas Wilayah Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir & abrasi	Optimalisasi, Pengendalian, dan Teknologi Tepat Guna Fokuspada Keandalan layanan, efisiensi, dan adaptasi teknologi peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir & abrasi	Evaluasi, Keberlanjutan dan Replikasi fokus pada pemerataan pembangunan dan penguatan kelembagaan pemeliharaan melalui Evaluasi kondisi dan dampak seluruh infrastruktur yang telah dibangun, Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BLUD daerah, Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air, Program padat karya pemeliharaan jalan oleh masyarakat

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan arah kebijakan RPJMD serta

selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih & sanitasi	
		Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan	Terciptanya layanan akses konektivitas antarwilayah yang lancar	
		Pemenuhan sarana/prasarana pelayanan dasar	Pembangunan Sarana prasarana air berish, sanitasi, jalan/jembatan, dan drainase, serta penanggulangan banjir dan abrasi	
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana kawasan agropolitan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	
		Pemantapan tata ruang	Penyelesaian Revisi RTRW Kab./Kota	
		Pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya	
		Pengembangan kawasan agropolitan	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan sampah	
		Peningkatan kualitas tenaga kerja	Pelatihan tenaga kerja lokasl bersertifikasi kompeten	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD, yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Berikut adalah kerangka perumusan Program-Sub Kegiatan :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

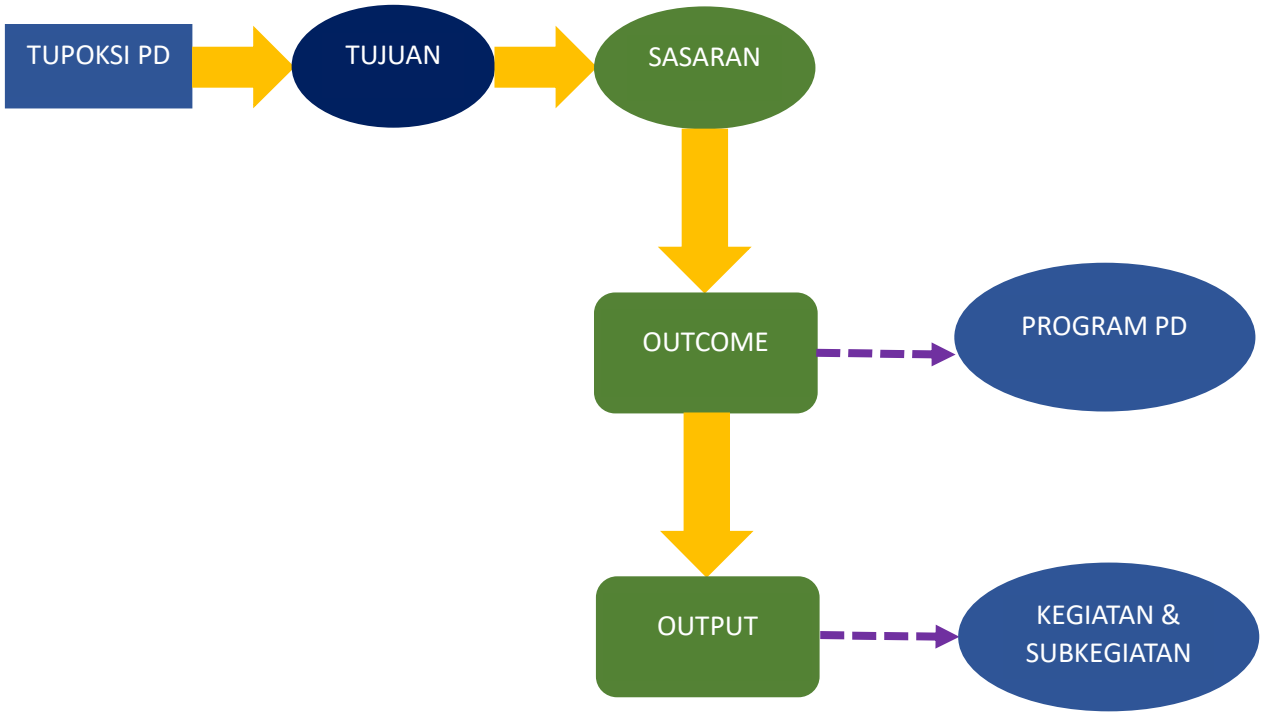

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				Indeks Daya Saing Infrastruktur		
		Meningkatnya cakupan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
					Tingkat Kemantapan Jalan		

			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Terpenuhinya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

						(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	

					setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.07.2.01.0010 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Tersedianya bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan	

					Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan	

					Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

					Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	

					Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	

					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan	

					Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
					Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi pada wilayah sungai kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	

					Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Breakwater yang Dibangun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan	

						Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Breakwater yang Dibangun	1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	

					Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	

						Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	

						Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	1.03.02.2.02.0007 - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi	

					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
		Terlaksananya penataan ruang dan pengendalian kawasan strategis agropolitan secara adaptif dan berkelanjutan			Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		
					Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi	

						Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

				Terkaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal dalam mendukung pembangunan			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		

		wilayah agropolitan					
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		
			Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terpenuhinya pengembangan sistem dan pengolahan persampahan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	

					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Terbangunnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan	

						Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR			Nilai SAKIP		
					Persentase Material Pemeriksaan Keuangan		
			Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum	

					Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan PD Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlayaninya Pegawai Perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.03.01.2.05 - Administrasi	

				Daerah tepat waktu		Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Perangkat Daerah			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusa Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.553.436.125,90		26.835.376.713,79		27.102.290.800,66		27.374.357.988,69		27.648.785.326,07	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.710.632.390,97		4.770.632.390,97		4.820.632.390,97		4.885.132.390,97		4.920.632.390,97	
Terpenuhinya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100	100	4.710.632.390,97	100	4.770.632.390,97	100	4.820.632.390,97	100	4.885.132.390,97	100	4.920.632.390,97	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		39.000.000,00		24.500.000,00	
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2	10.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	2.000.000,00	
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	2.000.000,00	

1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	2.000.000,00	
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	5.000.000,00	1	2.500.000,00	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2	2.000.000,00	1	1.000.000,00	
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.025.682.390,97		4.075.682.390,97		4.125.682.390,97		4.175.682.390,97		4.225.682.390,97	
Terlaksananya Administrasi Keuangan PD Tepat waktu													
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.010.682.390,97		4.060.682.390,97		4.110.682.390,97		4.160.682.390,97		4.210.682.390,97	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	42	4.010.682.390,97	42	4.060.682.390,97	42	4.110.682.390,97	42	4.160.682.390,97	42	4.210.682.390,97	
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	

1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.700.000,00		12.700.000,00		12.700.000,00		12.700.000,00		12.700.000,00	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Standar													
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				67.150.000,00		67.150.000,00		67.150.000,00		67.150.000,00		67.150.000,00	
Terlayaninya Pegawai Perangkat Daerah tepat waktu													
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00	
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	

1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	8	45.000.000,00	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	

1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.600.000,00		165.600.000,00		165.600.000,00		165.600.000,00		165.600.000,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah													
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00		15.600.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	1	15.600.000,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Tersedianya Pemeliharaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusa Perangkat Daerah													
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	

1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				1.500.000.000,00		2.325.000.000,00		3.070.000.000,00		3.025.000.000,00		3.475.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	0	15	1.500.000.000,00	20	2.325.000.000,00	25	3.070.000.000,00	30	3.025.000.000,00	35	3.475.000.000,00	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	4.24	2.13		4.24		6.35		8.46		10.57		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		700.000.000,00		920.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi pada wilayah sungai kabupaten													
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				-		-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0	0	-	0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0	0	-	0.05	50.000.000,00	0.05	50.000.000,00	0.05	50.000.000,00	0.05	50.000.000,00	
1.03.02.2.01.0102 - Pembangunan Breakwater				-		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0	0	-	0.1	100.000.000,00	0.12	120.000.000,00	0.15	150.000.000,00	0.15	150.000.000,00	
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0.05	0	-	0.05	100.000.000,00	0.05	100.000.000,00	0.05	100.000.000,00	0.05	100.000.000,00	
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				-		-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.13	0	-	0	-	0.13	100.000.000,00	0.13	100.000.000,00	0.13	100.000.000,00	
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	30	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				-		50.000.000,00		-		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.100.000.000,00		1.625.000.000,00		2.150.000.000,00		2.025.000.000,00		2.475.000.000,00	
Terkelolanya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 daerah kabupaten/kota													
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.03.02.2.02.0007 - Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah				-		-		200.000.000,00		-		-	

Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	0	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				600.000.000,00		825.000.000,00		1.150.000.000,00		1.350.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	0.6	600.000.000,00	0.8	825.000.000,00	1.1	1.150.000.000,00	1.3	1.350.000.000,00	1.5	1.500.000.000,00	
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	0.3	50.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	0.5	100.000.000,00	
1.03.02.2.02.0026 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah				-		-		-		75.000.000,00		75.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	0	-	0	-	0	-	0.05	75.000.000,00	0.05	75.000.000,00	
1.03.02.2.02.0048 - Peningkatan Bendung Irigasi				-		200.000.000,00		-		-		300.000.000,00	
Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	0	0	-	1	200.000.000,00		-		-	1	300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				-		-		200.000.000,00		-		-	
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0	0	-	0	-	2	200.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.02.2.02.0054 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				8.600.000.000,00		9.000.000.000,00		9.065.000.000,00		9.350.000.000,00		9.150.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	84	100	8.600.000.000,00	100	9.000.000.000,00	100	9.065.000.000,00	100	9.350.000.000,00	100	9.150.000.000,00	

1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				8.600.000.000,00		9.000.000.000,00		9.065.000.000,00		9.350.000.000,00		9.150.000.000,00	
Terpenuhinya rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten													
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	15	550.000.000,00	
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				4.500.000.000,00		4.550.000.000,00		4.565.000.000,00		4.600.000.000,00		4.600.000.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	5	4.500.000.000,00	5	4.550.000.000,00	5	4.565.000.000,00	5	4.600.000.000,00	5	4.600.000.000,00	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				3.450.000.000,00		3.800.000.000,00		3.850.000.000,00		3.900.000.000,00		3.900.000.000,00	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1449	380	3.450.000.000,00	416	3.800.000.000,00	422	3.850.000.000,00	427	3.900.000.000,00	427	3.900.000.000,00	
1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				-		-		-		200.000.000,00		-	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000,00	0	-	

1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				-		-		50.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	0	0	-	0	-	0	50.000.000,00	20	150.000.000,00	30	100.000.000,00	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				-		-		50.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00	
Terpenuhinya pengembangan sistem dan pengolahan persampahan di daerah kabupaten/kota													
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		-		-		-		100.000.000,00	
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	5	100.000.000,00	
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				-		-		50.000.000,00		-		-	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				-		-		-		50.000.000,00		-	
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				-		-		-		100.000.000,00		-	
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	10	100.000.000,00	0	-	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.350.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	77.22	100	1.350.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	100	1.550.000.000,00	

1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.350.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota													
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	77.22	100	1.300.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.300.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	1.46	2.03	2.300.000.000,00	2.47	1.600.000.000,00	3.37	1.600.000.000,00	3.88	1.600.000.000,00	4.85	1.600.000.000,00	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.300.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Terbangunnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota													

1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		0.11	2.200.000.000,00	0.16	1.500.000.000,00	0.20	1.500.000.000,00	0.25	1.500.000.000,00	0.29	1.500.000.000,00	
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				700.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0	100	700.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00	
Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0	100	50.000.000,00	150	50.000.000,00	200	50.000.000,00	250	50.000.000,00	300	50.000.000,00	
1.03.07.2.01.0010 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				650.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		-		100.000.000,00	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	0	3	650.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-	2	100.000.000,00	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	

Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	0	10	330.000.000,00	15	330.000.000,00	20	330.000.000,00	25	380.000.000,00	30	380.000.000,00	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00	
Tersedianya bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung													
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	93	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00	105	100.000.000,00	110	100.000.000,00	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota		1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				5.612.803.734,93		5.709.744.322,82		5.911.658.409,69		5.859.225.597,72		5.728.152.935,10	

meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	24.55	26.20	5.612.803.734,93	27.20	5.709.744.322,82	28.20	5.911.658.409,69	29.20	5.859.225.597,72	30.20	5.728.152.935,10	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				5.612.803.734,93		5.709.744.322,82		5.911.658.409,69		5.859.225.597,72		5.728.152.935,10	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten													
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	442.18	442.18	550.000.000,00	442.18	550.000.000,00	442.18	550.000.000,00	442.18	550.000.000,00	442.18	550.000.000,00	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				-		-		100.000.000,00		-		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	0	-	0	-	0.5	100.000.000,00	0	-	0.5	100.000.000,00	
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				-		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	0	0	-	15	2.250.000.000,00	15	2.250.000.000,00	15	2.250.000.000,00	15	2.250.000.000,00	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0	0	-	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				862.803.734,93		1.009.744.322,82		1.111.658.409,69		1.159.225.597,72		1.278.152.935,10	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	28.7	0.7	862.803.734,93	1	1.009.744.322,82	1.2	1.111.658.409,69	1.3	1.159.225.597,72	1.4	1.278.152.935,10	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				3.000.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		250.000.000,00	

Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun		20	3.000.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	10	600.000.000,00	6	250.000.000,00	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				300.000.000,00		305.000.000,00		205.000.000,00		215.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	0	75	300.000.000,00	75	305.000.000,00	75	205.000.000,00	75	215.000.000,00	75	250.000.000,00	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				195.000.000,00		160.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di tingkat kabupaten/kota													
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0	10	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	5.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				135.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	75	135.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				105.000.000,00		95.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00	
Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota													

1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				20.000.000,00		40.000.000,00		-		-		25.000.000,00	
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0	2	20.000.000,00	3	40.000.000,00	0	-	0	-	2	25.000.000,00	
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		25.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0	1	15.000.000,00	2	25.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				50.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	2	50.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-		50.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi													
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				-		-		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0	0	-	0	-	20	20.000.000,00	25	25.000.000,00	30	30.000.000,00	
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				-		50.000.000,00		-		-		-	

Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.050.000.000,00		1.045.000.000,00		300.000.000,00		210.000.000,00		245.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten)	100	100	1.050.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	300.000.000,00	100	210.000.000,00	100	245.000.000,00	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				300.000.000,00		355.000.000,00		60.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota													
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		-		-		-	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				-		25.000.000,00		-		-		-	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0	0	-	1	25.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				-		30.000.000,00		-		-		-	
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	0	0	-	1	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				-		-		50.000.000,00		-		-	

Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				-		-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0	0	-	0	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		550.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		-	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				-		-		50.000.000,00		-		-	
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		-	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-	
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				600.000.000,00		500.000.000,00		-		-		-	
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	1	600.000.000,00	1	500.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	65	85	150.000.000,00	90	140.000.000,00	95	140.000.000,00	100	150.000.000,00	105	150.000.000,00	

	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0	1		1		1		1		1		
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	65	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	95	100.000.000,00	100	100.000.000,00	105	100.000.000,00	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		85.000.000,00	
Terkaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				-		-		-		-		50.000.000,00	
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	
1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				-		-		-		-		35.000.000,00	
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	35.000.000,00	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penyediaan Unit pengolahan setempat	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			- Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			- Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			- Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Pembangunan Jembatan	
			- Penggantian Jembatan	
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan	

			serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Rehabilitasi Jembatan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			- Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

			- Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	

10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
			- Pembangunan & Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			- Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	58,82%	59,85%	60,89%	61,92%	62,96%	63,99%	
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,28%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
4	Tingkat Kemantapan Jalan	%	24,55%	25,20%	26,20%	27,20%	28,20%	29,20%	

5	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0,00%	40,00%	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%	
7	Persentase bangunan gedung publik dalam kondisi baik	%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Nilai SAKIP	Bobot	B	B	B	B	BB	BB	
10	Persentase Material Pemeriksaan Keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	persen	25,20	26,20	27,20	28,20	29,20	30,20	
2	luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	5054,00	5054,00	5054,00	5054,00	5054,00	5054,00	Berkoordinasi dengan DKPP
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	

4	luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	758,10	758,10	758,10	758,10	758,10	758,10	
5	persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa di tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	persen	0,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
7	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	persen	0,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
9	jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	orang	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
10	Pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang	kasus	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	
11	penyelesaian materi teknis RTRW	Materi Teknis	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	penetapan RTRW	Perda	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Penyelesaian materi Teknis RDTR	Materi Teknis	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
14	Penetapan RDTR	Perda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
15	jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	hektar	758,10	758,10	758,10	758,10	758,10	758,10	

16	persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik layak dan aman)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	persentase peningkatan sampah yang dikelola TPA/TPST Regional	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
18	Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengaman pantai yang dibangun	Km	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
19	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m3/detik	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
20	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26	persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Berkoordinasi dengan DLH
27	persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	persen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
29	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
30	proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Berkoordinasi dengan DLH
31	persentase rumah tangga di perkotaan yang mendapatkan akses kepada pelayanan pengumpulan sampah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Berkoordinasi dengan DLH
32	persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	rumah tangga dengan akses air minum perpipaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

36	persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	persen	0,00	0,11	0,16	0,20	0,25	0,29	
37	persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	persen	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	
39	persentase penataan bangunan dan lingkungan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
40	rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	rasio							
41	rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	0,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	
42	rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
43	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0,00	15,00	20,00	20,50	21,00	21,50	
44	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	persen	0,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	
45	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	persen	0,00	15,00	20,00	20,50	21,00	21,50	

46	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	0,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	
47	Kapasitas Air Baku	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
48	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	persen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
49	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	persen	83,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

BAB V
PENUTUP

Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mengarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan prioritas yang mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Renstra ini juga telah menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan daerah, serta memperhatikan kebutuhan daerah dalam mendorong konektivitas, peningkatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur, penguatan kawasan agropolitan, serta penataan ruang yang terpadu dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika sosial ekonomi.

Pelaksanaan Renstra ini akan dilakukan melalui rencana kerja tahunan (Renja) yang disusun setiap tahun oleh Dinas PUPR, dengan mengacu pada dokumen ini sebagai pedoman utama. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap regulasi teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah pelaksanaan juga mencakup koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan, perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara berkala, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi kinerja perangkat daerah, serta monitoring dan evaluasi (monev) tahunan dan lima tahunan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program serta pencapaian target indikator kinerja utama.

Evaluasi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, penyesuaian strategi, serta optimalisasi sumber daya demi menjamin ketercapaian tujuan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara efektif dan berkelanjutan.

Mamuju Tengah,…….2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah,

Ir. USMAN, ST., M.M
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19770825 201001 1 012